

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan *transnational* merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem keamanan internasional kontemporer, terutama di wilayah perbatasan negara yang memiliki karakter geografis terbuka dan pengawasan terbatas. Salah satu bentuk kejahatan transnational yang terus berkembang adalah penyelundupan narkoba, yang tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan suatu negara, tetapi juga mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu narkoba tidak lagi bersifat domestik, melainkan telah menjadi persoalan lintas batas yang memerlukan perhatian serius dari negara-negara yang terdampak (Beare 2012).

Dalam konteks Indonesia, kawasan perbatasan darat antara Papua dan Papua Nugini merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan narkoba. Kondisi geografis wilayah perbatasan yang terbuka, minimnya infrastruktur pengawasan, serta kuatnya hubungan sosial dan ekonomi masyarakat lintas batas menjadikan kawasan ini rentan dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional. Perbatasan Indonesia Papua–Papua Nugini tidak hanya berfungsi sebagai jalur mobilitas masyarakat lokal, tetapi juga menjadi titik strategis bagi peredaran narkoba yang dapat mengancam keamanan nasional Indonesia. Situasi tersebut menuntut peran aktif dan strategi yang komprehensif dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan (Ahmad 2024). Upaya

penanganan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Pendekatan juga harus mempertimbangkan faktor politik, sosial, dan peran kelembagaan di tingkat nasional maupun internasional. Kompleksitas permasalahan ini menunjukkan bahwa penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan merupakan isu multidimensional yang memerlukan koordinasi cross-sector dan cross-border.

Berdasarkan kondisi tersebut, skripsi ini berupaya mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di kawasan perbatasan Indonesia Papua–Papua Nugini. Untuk menganalisis dinamika keamanan di wilayah tersebut, penelitian ini menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT) yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Teori ini menekankan bahwa isu keamanan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari lingkungan regionalnya, serta pentingnya kerja sama antarnegara dan peran institusi dalam menghadapi ancaman lintas batas (Buzan & Waever 2003). Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas strategi Indonesia dalam menghadapi penyelundupan narkotika di perbatasan.

Dalam konteks hubungan internasional, kejahatan lintas batas menimbulkan tantangan unik yang membutuhkan pendekatan global. Kejahatan semacam ini tidak hanya berdampak pada keamanan internal suatu negara, tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan keamanan internasional secara keseluruhan (Buzan & Waever 2003). Respon terhadap kejahatan lintas batas memerlukan kerjasama erat antarnegara, lembaga internasional, dan sektor swasta melalui mekanisme seperti perjanjian bilateral dan multilateral, kerjasama polisi dan keamanan, serta

pertukaran informasi dan intelijen (UNODC 2004). Kerumitan dalam menanggulangi kejahatan lintas batas terletak pada perbedaan sistem hukum, kapasitas penegakan hukum, dan prioritas kebijakan antarnegara, yang sering memperlambat proses koordinasi dan implementasi.

Perdagangan narkoba merupakan ancaman serius yang tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga merusak struktur sosial-ekonomi suatu negara. Dampak negatif perdagangan narkoba dapat meluas ke wilayah lain melalui jalur lintas batas, memperburuk masalah kesehatan masyarakat dan menimbulkan ketidakstabilan di tingkat regional (Swanstrom 2007). Penanganan kejahatan lintas batas ini membutuhkan upaya bersama antarnegara. *Harmonization of transnational legal frameworks* menjadi aspek krusial dalam pembentukan kerangka kerja hukum yang seragam, yang memungkinkan kerja sama lebih efisien antara lembaga penegak hukum di tingkat internasional.

Wilayah yang luas sering kali menghadapi beragam tantangan, termasuk keragaman etnis, ras, keyakinan agama, isu geografis, dan permasalahan perbatasan. Isu perbatasan berperan krusial dalam penegasan kedaulatan suatu negara (Rinaldi 2023). Sebuah negara memiliki otoritas tertinggi untuk menegakkan hukum dan regulasinya (*internal sovereignty*) serta menjaga kemerdekaannya dari ancaman negara lain dan memelihara kedaulatan eksternalnya (*external sovereignty*). Oleh karena itu, permasalahan perbatasan, yang sering berkaitan dengan perjanjian internasional, menjadi sumber konflik, terutama dalam hal kedaulatan antarnegara.

Republik Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan daratan, lautan, dan ruang udara, memiliki garis pantai sepanjang ±81.900 km dan sekitar 17.508 pulau kecil. Indonesia berbatasan langsung di darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Wilayah perbatasan cenderung kurang berkembang karena jaraknya jauh dari pusat pemerintahan dan minimnya perhatian pemerintah pusat, yang lebih fokus pada daerah padat penduduk dan potensi ekonomi besar (Legionosuko 2019). Infrastruktur, fasilitas publik, dan pelayanan di kawasan perbatasan minim. Kondisi perumahan dan pemukiman kurang memadai, dengan kepadatan penduduk rendah, yang turut menimbulkan berbagai masalah di wilayah ini.

Papua Nugini memegang peranan penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan, khususnya di Provinsi Papua, bagian paling timur Indonesia. Wilayah ini sering kurang mendapat perhatian karena lokasi terpencil, keterbatasan transportasi, dan perkembangan yang lambat dibanding wilayah lain (Permatasari 2014). Kondisi keamanan yang rentan dan kapasitas aparat yang terbatas menjadikan ancaman penyelundupan narkoba sebagai tantangan serius bagi pemerintah saat ini dan di masa depan (R. Pugu 2019).

Wilayah perbatasan sering menjadi jalur tradisional masyarakat lokal yang masih menjalin hubungan kekerabatan berdasarkan adat. Namun, keadaan ini sering dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan provokatif dan kriminal. Kawasan ini rentan terhadap penyelundupan narkoba, obat-obatan terlarang, serta potensi infiltrasi atau *exfiltration* intelijen asing (A. Permatasari 2019). Kurangnya sarana, prasarana, dan aktivitas pengawasan aparat

membuat pengamanan wilayah perbatasan belum optimal, sehingga pelanggaran batas dan tingkat kriminalitas tetap tinggi.

Berdasarkan data Puslitdatin BNN (2021), terdapat 12 provinsi rawan narkoba, termasuk Provinsi Papua dan Papua Selatan, yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Letak geografis strategis dan minimnya pengawasan memudahkan masuknya narkoba. Kerawanan ini juga diperparah oleh minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menangani masalah narkoba, menjadikan Papua dan Papua Selatan sebagai salah satu pintu masuk peredaran narkoba ke dan dari Papua Nugini.

Penyelundupan narkoba telah lama menjadi masalah keamanan transnasional mendesak karena dampak luasnya terhadap masyarakat global. Faktor penyebabnya meliputi permintaan tinggi, ketidakstabilan ekonomi, dan keuntungan besar dari perdagangan ilegal. Narkoba memengaruhi negara produsen, konsumen, dan negara transit (Rinaldi 2023). Perdagangan global ini sulit ditangani karena melibatkan banyak yurisdiksi dengan berbagai tingkat efektivitas penegakan hukum. Kemajuan teknologi dan media sosial mempermudah koordinasi penyelundup dan pengelabuan aparat penegak hukum.

Aspek penting lain adalah dampaknya terhadap keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat. Penyelundupan narkoba sering terkait kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan manusia, pencucian uang, dan terorisme (Swanstrom 2007). Hal ini menuntut respons komprehensif dan multidimensi dari pemerintah dan lembaga internasional. Strategi penanggulangan harus terus diperbarui karena metode penyelundup selalu berubah. Selain itu, masalah ini

memiliki dimensi sosial dan kesehatan yang signifikan. Konsumsi narkoba berlebihan menyebabkan ketergantungan, penyakit menular, dan kematian. Dampak sosialnya termasuk kerusakan hubungan keluarga, kehilangan produktivitas, dan peningkatan kekerasan, menimbulkan beban ekonomi dan sosial. Pendekatan yang efektif harus mencakup pendidikan masyarakat, pencegahan, dan rehabilitasi (BNN 2014).

Penelitian ini penting karena fokus pada strategi Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia Papua–Papua Nugini menggunakan RSCT. Pendekatan ini menekankan hubungan keamanan nasional dengan dinamika regional, serta pentingnya koordinasi lintas negara dan lintas sektor. Dengan pemahaman ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi kebijakan keamanan nasional, memperkuat kerja sama regional, dan meningkatkan efektivitas strategi penanggulangan narkoba lintas batas.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana strategi Indonesia dalam menangani penyelundupan narkoba di lintas batas Indonesia - Papua Nugini ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini hadir untuk menelaah dinamika kerjasama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini dalam menghadapi isu penyelundupan narkoba lintas batas. Ia bermaksud untuk menelusuri strategi, efektivitas kebijakan, dan tantangan

yang dihadapi kedua negara dalam mengendalikan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Indonesia Papua – Papua Nugini, Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui efektivitas strategi dan mekanisme kerjasama yang diterapkan Indonesia dan Papua Nugini dalam menangani penyelundupan narkoba lintas batas.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efisiensi kerjasama, termasuk perbedaan kebijakan, hambatan hukum, serta kapasitas operasional kedua negara.
3. Mengevaluasi sejauh mana kerjasama bilateral mampu meminimalisir peredaran narkoba ilegal yang merugikan Indonesia.
4. Menawarkan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas negara dalam memerangi kejahatan transnasional.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyelundupan narkoba. Terutama bagi mereka yang bermukim di wilayah perbatasan, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menjaga keamanan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, sadar hukum, dan bebas dari ancaman kejahatan lintas batas.

#### **1.5 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan akademis bidang hubungan internasional terkait kajian politik, hukum, dan keamanan internasional dalam konteks kerjasama bilateral antara Indonesia dan

Papua Nugini dalam mengatasi penyelundupan narkoba lintas batas. Pertama, penelitian ini memperkaya pemahaman akademis mengenai dinamika dan efektivitas kerjasama antarnegara dalam mengatasi penyelundupan narkoba lintas batas. Melalui analisis mendalam, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sukses dan kegagalan dalam kerjasama tersebut, memberikan wawasan baru yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian masa depan.

Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dengan mengaplikasikan pendekatan multidisipliner dalam memahami isu kejahatan transnasional. Dengan menggabungkan teori dari berbagai disiplin ilmu, penelitian ini menawarkan kerangka kerja analisis baru yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengeksplorasi kasus serupa di kawasan lain atau dalam konteks isu transnasional yang berbeda.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan tentang bagaimana strategi-strategi yang diterapkan oleh Indonesia dan Papua Nugini dapat mempengaruhi dinamika regional dan memberi dampak pada kerjasama internasional yang lebih luas. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana upaya kedua negara dalam menciptakan keseimbangan kekuatan dan keamanan dapat mempengaruhi kebijakan global dan regional, serta implikasinya bagi tata kelola internasional. Dengan mencapai pemahaman yang lebih luas mengenai peran dan strategi kerjasama bilateral dalam konteks global, studi ini bertujuan untuk menawarkan perspektif baru terhadap tantangan dan solusi dalam menangani kejahatan transnasional. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi penting kepada literatur akademis, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi

pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi kebijakan luar negeri dan pengambilan keputusan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana kolaborasi antara Indonesia dan Papua Nugini dapat menyeimbangkan kekuatan regional dan mengurangi ketimpangan dalam penegakan hukum internasional.

### **1.6 Manfaat Praktis**

Dari perspektif praktis, penelitian ini memiliki manfaat luas bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga penegak hukum. Pertama, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini, memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi, dan kapasitas lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini menjadi dasar pengembangan kebijakan dan program kerjasama multilateral dengan negara lain dan organisasi internasional. Dengan menyajikan analisis efektivitas pendekatan yang diterapkan, penelitian ini menawarkan solusi kreatif yang dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan memicu kesadaran dan dukungan internasional terhadap isu penyelundupan narkoba lintas batas.

Penelitian ini juga menjadi referensi penting bagi mahasiswa dan akademisi dalam studi kebijakan narkoba, kerjasama internasional, dan pencegahan kejahatan lintas batas. Dengan menyediakan analisis berbasis bukti, penelitian ini memperkuat pengetahuan akademis dan mendorong penelitian lanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam kerjasama bilateral saat ini, tetapi juga mengusulkan kerangka kerja strategis untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan penyelundupan narkoba. Dengan

demikian, penelitian ini menjadi panduan berharga bagi pengambil kebijakan dan praktisi. Lebih jauh lagi, penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama internasional yang lebih erat dan terkoordinasi, serta perlunya komitmen global yang kuat untuk mengatasi kejahatan lintas batas yang semakin kompleks.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab dan sub-bab, dengan fokus pada strategi Indonesia dalam menangani penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia Papua–Papua Nugini. Bab 1 membahas latar belakang penelitian mengenai kejahatan lintas batas, khususnya penyelundupan narkoba di Provinsi Papua, serta merinci rumusan masalah yang menekankan efektivitas strategi dan kerjasama bilateral Indonesia dengan Papua Nugini. Tujuan penelitian dijelaskan secara spesifik untuk memberikan arah yang jelas, sementara manfaat penelitian diuraikan dalam konteks akademis dan praktis, dengan penekanan pada relevansi strategi nasional Indonesia. Bab ini juga disertai penjelasan mengenai sistematika penulisan yang akan diikuti.

Bab 2 menguraikan kajian pustaka yang mencakup teori-teori dan konsep-konsep terkait kejahatan lintas batas, kerjasama internasional, serta kerangka teori *Regional Security Complex Theory (RSCT)* yang digunakan untuk menganalisis strategi Indonesia di kawasan perbatasan. Bab ini juga menelaah penelitian terdahulu yang relevan, membandingkannya dengan fokus studi ini, dan memberikan gambaran metodologis mengenai pendekatan penelitian.

Bab 3 membahas karakteristik kejahatan lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia Papua–Papua Nugini, termasuk modus operandi penyelundupan

narkotika, dampaknya terhadap keamanan nasional, serta tantangan yang dihadapi aparat Indonesia. Bab ini juga menyajikan data dan fakta terkait kasus, sekaligus evaluasi awal terhadap strategi dan kerjasama bilateral yang telah diterapkan

Bab 4 merupakan inti penelitian yang menganalisis secara mendalam strategi Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di perbatasan Indonesia Papua–Papua Nugini. Analisis mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi, kekuatan dan kelemahan yang ada, serta rekomendasi peningkatan, dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan tindakan represif, preventif, dan diplomasi bilateral.

Bab 5 memuat kesimpulan yang merangkum temuan utama mengenai strategi Indonesia, beserta rekomendasi kebijakan dan arah penelitian selanjutnya. Bab ini menekankan pentingnya penguatan strategi nasional, koordinasi lintas instansi, dan kerjasama internasional yang efektif untuk menanggulangi penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia Papua–Papua Nugini, sekaligus menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan peneliti masa depan.masa depan.